

BAB V

KESIMPULAN

Dalam penelitian yang membahas tentang etnis Roma yang di deportasi selama beberapa kali oleh Perancis ini, membuktikan bahwa migrasi akan menjadi sebuah ancaman oleh satu negara bila migrasi tersebut menimbulkan aksus-kasus yang dibuat oleh para imigran. Dalam hal ini, pemerintah Perancis mempertimbangkan keamanan negaranya yang terancam karena adanya beberapa kasus yang dilakukan oleh imigran etnis Roma. Etnis Roma sendiri memang dikenal sebagai etnis yang suka berpindah-pindah ke suatu negara ke negara yang lain. Tidak hanya Perancis yang menjadi tujuan migrasi dari etnis ini, namun sebelumnya etnis ini sudah bermigrasi ke Italia dan Jerman. Banyak anggapan-anggapan yang buruk kepada etnis ini termasuk di negara-negara anggota Uni Eropa.

Uni Eropa sebagai organisasi yang menaungi negara-negara besar termasuk Perancis dan Rumania sebelumnya mempunyai perjanjian yang sudah disepakati oleh negara-negara anggotanya yang berisi terkait hak kebebasan berpindah itu di negara anggota Uni Eropa.

Keunggulan Hukum Uni Eropa dalam hal kebebasan berpindah ke hukum nasional Prancis dapat diselesaikan apabila cakupan dan capaian atas Hukum Uni Eropa itu sendiri dibatasi. Seperti halnya prinsip hukum Uni Eropa yang terpenting dari semuanya. Keseluruhan cakupan atas Undang-undang Uni Eropa harus ditujukan untuk suatu pembatasan dalam rangka kelayakan implementasi untuk suatu hasil. Prancis sekarang ini lalai dalam hal penerapan atas Hukum Uni Eropa terkait dengan kewarganegaraan dan kebebasan berpindah, yang merupakan suatu contoh utama bagaimana interpretasi yang substansial atas pasal dalam Uni Eropa adalah lebih tinggi untuk implementasi dan penggambaran batas-batas dalam peraturan hukum di Uni Eropa.

Kampanye yang menyerukan Anti-Roma telah menghadapi reaksi keras dari berbagai pihak yang bermacam-macam dalam Prancis dan luar yang harus dihentikan. Penduduk Roma di Uni Eropa, seperti halnya penduduk lainnya, memelihara hak untuk berpindah dan bertempat tinggal di Negara-negara Uni Eropa, dan harus mematuhi Peraturan Kebebasan Berpindah dalam Undang-Undang EU. Pemerintah Prancis memiliki tanggung jawab utama untuk mengembangkan sebuah kebijakan implementasi yang menjamin adanya penghargaan atau penghormatan atas martabat manusia dan hak-hak Roma dan juga menjaga kesetiaan kepada kedaulatan huku Negara. Bagaimanapun, proses tersebut mengingatkan sebuah dua jalan. Komunitas Roma membutuhkan demonstrasi ke otoritas Prancis dalam hal peningkatan kepentingan dalam tanggung jawab warga sebagai gantinya untuk usaha pemerintah untuk membuat suatu peluang yang tersedia untuk mereka. Jelas bahwa Roma tidak dapat mengangkat keluar diri mereka sendiri atas apa yang terjadi sekarang ini dalam keadaan sulit untuk menjadi anggota yang produktif dan segera untuk dihilangkannya gagasan atas anti-Gypsy. Sebaliknya, proses akan memerlukan suatu “Penyeberangan luar” komitmen atas Roma dalam ikut serta dan megubah secara sistematis anggapan atas sentiment Anti-Roma.

Masalah etnis Roma di Perancis ini membawa Uni Eropa untuk melakukan tindakan, yaitu upaya integrasi etnis Roma di Rumania dan negara-negara anggota Uni Eropa. Uni Eropa ingin memperbaiki stigma negatif yang selama ini ada di negara-negara Uni Eropa, termasuk Perancis. Bidang yang menjadi fokus Uni Eropa yaitu pada bidang Pendidikan, pekerjaan, maupun kesehatan. Bagaimanapun, dalam cakupan yang lebih luas Uni Eropa, sebuah “kumpulan sub unit Negara” akan selalu mengangkat tuntutan atas keistimewaan dengan cara ini. Dorongan hukum untuk “Persatuan atau *Union*” dalam hal immigrasi, kebebasan berpindah dan hak minoritas mendesak sebuah kebutuhan realokasi atas kebutuhan

kekuasaan untuk menentukan bagaimana menangani pengakuan dan integritas. Tidak diragukan lagi dalam menciptakan sebuah tensi dalam Uni Eropa diantara kepentingan persaingan oleh Negara-negara sub unit dalam hal mengistimewakan dan kepentingan migran dalam integritas. Tepatnya tensi ini yang telah membuka sendiri melalui perjuangan Roma melewati anggota Uni eropa seperti Prancis, yang berusaha untuk memelihara identitas nasionalnya dan kekhasannya.

Uni Eropa harus menggunakan situasi sekarang ini di Prancis sebagai tanda masalah dan sebuah contoh kenapa ada sebuah kebutuhan untuk kebijakan dasar yang ditargetkan dalam hak integritas dan persamaan berdasarkan standar kemajuan perpaduan sosial. Apabila Uni Eropa dapat secara tepat menegakkan dan mengimplementasikan prosedur keamanan yang ditujukan untuk integritas minoritas dan kebebasan berpindah, maka selanjutnya akan menuju langkah selanjutnya yaitu terwujudnya bagi seluruh warga atas janji *civis europaeus sum*.

Sebagai kepala negara, Sarkozy mempunyai alasan untuk akhirnya mendeportasi etnis Roma ini dari negaranya. Dari teori sekuritisasi migrasi milik Philippe Bourbeau, menjelaskan bahwa keamanan merupakan aspek yang penting, undang-undangan atau kebijakan suatu negara yang mengatur terkait imigran merupakan hal yang penting untuk negara penerima agar mengatur dengan baik imigran yang datang dan meminimalisasi adanya kemungkinan dari tindak kejahatan yang dibuat oleh imigran.

Selain itu teori *Rational Choice* juga berhubungan dengan permasalahan ini, dimana teori ini memiliki beberapa elemen dalam menentukan pilihan rasional tersebut. Ialah *methodological individualism, goal-seeking, dan strategic constraints on individual choice*. Elemen tersebut menjelaskan bahwa dalam pilihan rasional adanya actor, kepentingan nasional sebuah Negara yang menjadi tujuan kebijakan, dan pertimbangan untung rugi menjadi pertimbangan untuk mengambil sebuah kebijakan. Perancis sendiri mempunyai

kepentingan-kepentingan yang harus dipenuhi oleh negaranya, selain itu tentu pengambilan keputusan ini juga dipertimbangkan oleh Sarkozy mengingat keuntungan dan kerugian yang akan didapatkan olehnya terkait kebijakannya. Dari segi faktor ekonomi, keamanan, maupun terkait tata letak kotanya yang kumuh dengan adanya kamp-kamp etnis Roma. Jika dengan mendeportasi etnis roma, Perancis tetap lebih banyak mendapatkan keuntungan daripada kerugian yang ia dapat dari diambilnya kebijakan deportasi tersebut. Beberapa teguran maupun pemberitaan terhadap negara nya dan Sarkozy sendiri sebagai kepala negara Perancis pada saat itu, setidaknya tidak banyak mempengaruhi stabilitas ataupun kondisi politik dalam negerinya. Sedangkan, jika Sarkozy sebagai kepala negara Perancis melaksanakan perintah Uni Eropa tentu akan mempunyai banyak pekerjaan rumah untuk mengurus masalah etnis ini, baik itu kamp-kamp etnis Roma maupun hingga kerusuhan yang membuat etnis Roma dan kepolisian Perancis berselisih. Tentu, keamanan dan kepentingan suatu negara tetap menjadi salah satu pertimbangan sebuah keputusan. Perancis, sebagai negara yang berdaulat Perancis berhak untuk mengambil keputusan untuk melindungi kepentingan negaranya.

Dengan segala kelebihan dan kekurangannya, penulis berharap tulisan yang menguraikan alasan-alasan dibalik kebijakan Pemerintah Perancis untuk tetap mendeportasi etnis Roma meskipun mendapat tentangan dari Uni Eropa dapat bermanfaat bagi perkembangannya dalam studi Ilmu Hubungan Internasional khususnya untuk mata kuliah Kajian Uni Eropa mengenai penyelesaian masalah internal di negara-negara anggota Uni Eropa. Alasan-alasan dibalik pemerintah Perancis terhadap teguran dari Uni Eropa agar pemerintah Perancis tetap mempertahankan etnis Roma dan tidak mendeportasinya, disadari oleh penulis masih terlalu umum dan masih banyak kekurangan karna terbatasnya sumber dan data yang valid terhadap bahasan isu yang diteliti.

Dari hasil penelitian ini dapat diusulkan beberapa titik penelitian lanjutan, sebagai contoh bagaimana tindak lanjut dari

usaha Uni Eropa untuk mengintegrasikan etnis-etnis minoritas yang berada di dalam wilayah Uni Eropa. Dari masalah yang diangkat oleh penulis, ke depannya diharapkan penelitian ini dapat berkontribusi bagi berbagai penelitian yang memiliki latar belakang permasalahan seperti permasalahan yang dibahas penulis.